

## Sekularisasi dan Sekularisme di China

**Dimas Prihambodo**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
prihambododimas@gmail.com

Diterima 18-06-2021 | Direview 10-08-2021 | Diterbitkan 30-12-2021

### Abstract

Historians agree that secularization in Western Europe has occurred since 250 years ago. Over time, secularization has been seen as a major crisis for Christianity and the Western world. In the East, especially in the Islamic world, secularization has occurred in several places. This happened after the colonialization of Islamic countries by Europeans. Based on this, the author is interested in researching the secularization that has occurred in other Eastern worlds, namely China. The conclusion obtained is that secularization that occurs can be seen in two forms, namely the elimination of the sanctity and authority of religion from politics (desacralization of politics) and the elimination of the sanctity and absoluteness of values from life (deconsecration of values). In addition, Marxism-Leninism has contributed greatly to the process of secularization in China.

**Keyword:** Secularization, Secularism, Desacralization Of Politics, Deconsecration Of Values.

### Abstrak

Para pakar sejarah sepakat bahwa sekularisasi di Eropa Barat telah terjadi sejak 250 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, sekularisasi telah dianggap sebagai krisis besar bagi Kristen dan dunia Barat. Di dunia Timur, khususnya dunia Islam sekularisasi sudah terjadi di beberapa tempat. Hal tersebut terjadi setelah masa kolonialisasi negeri-negeri Islam oleh bangsa Eropa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sekularisasi yang terjadi di dunia Timur lainnya, yaitu China. Kesimpulan yang diperoleh adalah sekularisasi yang terjadi dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu peniadaan kesucian dan kewibawaan agama daripada politik (desacralization of politics) dan penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai daripada kehidupan (deconsecration of values). Selain itu, paham Marxisme-Leninisme memberikan andil besar pada proses sekularisasi di China.

**Kata Kunci:** Sekularisasi, Sekularisme, Desacralization Of Politics, Deconsecration Of Values.

### Pendahuluan

Para pakar sejarah sepakat bahwa sekularisasi di Eropa Barat telah terjadi sejak 250 tahun yang lalu. Alasan terjadinya dapat dirumuskan menjadi empat sebab. *Pertama*, terjadinya pertarungan pikiran dan pergolakan gagasan (*battles of minds and ideas*). Hal ini dapat dilihat pada sejarah penentangan pada ajaran Gereja oleh beberapa ilmuwan alam, seperti; Galileo, Copernicus, Darwin dan lainnya. Kedua, terjadinya pertarungan

pikiran pada bidang teologi. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya tokoh seperti; Eichhron dan Strauss yang berusaha menerapkan metode *historis-kritis* pada pengkajian Bibel. *Ketiga*, sebab terjadinya modernisasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada perubahan bentuk masyarakat yang sebelumnya agraris menjadi industri atau perdesaan menjadi perkotaan. *Keempat*, sekularisasi merupakan salah satu gejala sosial seperti; *idealisme* politik, budaya pop dan lainnya yang saling bertarung untuk mendapatkan pengaruh.<sup>1</sup>

Pada perjalanannya hingga saat ini, sekularisasi telah dianggap sebagai krisis besar pada Kristen dan dunia Barat. Hal demikian diungkapkan oleh seorang Kristian, Jacques Maritain yang menjelaskan bahwa terjadi peristiwa demikian sebab kesalahan penafsiran pada pengalaman dan pemahaman oleh para pemikir neo-modernis dari kalangan Kristen sendiri.<sup>2</sup> Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya akar dari sekularisasi telah ada pada ajaran Kristen itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada Gospel Matius XXII: 21 yang menjelaskan perkataan Yesus; “*Urusan Kaisar serahkan saja kepada Kaisar, dan urusan Tuhan serahkan kepada Tuhan*”. Sehingga dari padanya terjadi pemisahan antara otoritas Gereja dan kekuasaan Kaisar.<sup>3</sup> Adian Husaini menjelaskan lebih rinci tentang hal ini, bahwa terdapat tiga permasalahan terjadinya sekularisasi, yaitu problema teks Bibel, teologi Kristen dan trauma sejarah Gereja.<sup>4</sup> Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa fenomena sekularisasi merupakan suatu keniscayaan pada sejarah dunia Kristen dan Barat.

Di dunia Timur, khususnya dunia Islam sekularisasi sudah terjadi di beberapa tempat. Hal tersebut terjadi setelah masa kolonialisasi negeri-negeri Islam oleh bangsa Eropa. Sebagai contoh adalah India yang mana pemerintah kolonial saat itu mencabut hukum Islam dari perundang-undangan secara bertahap. Hingga saat ini, hanya akan dijumpai hukum pernikahan dan pewarisan pada perundang-undangan di India.<sup>5</sup> Hal berbeda terjadi pada Turki yang mana sekularisasi dilakukan tidak dengan peran kolonialisasi. Sekularisasi dilakukan oleh bangsanya sendiri, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya pembaharuan Turki atas dasar enam prinsip, antara lain; a) republikanisme; b) nasionalisme; c) populisme; d) etatisme; e)

---

<sup>1</sup> Syamsuddin Arief, *Islam dan Diabolisme Intelektual* (Jakarta Selatan: INSISTS, 2017), 63.

<sup>2</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, terj. Khalif Muammar A. Harris (Kuala Lumpur: RZS-Casis, 2020), 15.

<sup>3</sup> Syamsuddin Arief, *Islam dan Diabolisme Intelektual..*, 65.

<sup>4</sup> Adian Husaini, *Mengapa Barat Menjadi Sekuler-Liberal?* (Ponorogo: CIOS, Cet. 2, 2015), 3.

<sup>5</sup> Syamsuddin Arief, *Islam dan Diabolisme Intelektual..*, 70.

sekularisme; dan f) revolusionisme.<sup>6</sup> Pada hal ini, dapat terlihat upaya sekularisasi yang terjadi di dunia Timur, khususnya Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sekularisasi yang terjadi di dunia Timur lainnya. Maka pada penulisan ini akan coba diuraikan bagaimana sekularisasi terjadi di China. China pada hal ini tidak termasuk dalam dunia Barat, maupun Islam. Sehingga urgensi kepenulisan ini dapat terlihat dengan melihat fenomena sekularisasi dari tempat yang berbeda.

### ***Sekularisasi dan Sekularisme***

Sebelum masuk lebih jauh pada pokok bahasan, perlu disampaikan disini bahwa kedua istilah tersebut memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Namun pemaknaan secara umum, akan terlebih dahulu merujuk pada istilah *sekularisme*. Secara bahasa istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu; *secular* yang artinya temporal, fana, duniawi, tidak bersifat spiritual, abadi dan sakral, serta kehidupan diluar biara.<sup>7</sup> Kata tersebut pertama kali digunakan oleh George Jacob Holyoake pada pertengahan abad ke-19.<sup>8</sup> Istilah *sekularisme* kemudian banyak digunakan oleh para pemikir liberal untuk menghindari anggapan *ateisme* yang pada saat itu dianggap sebagai *immoralitas*.<sup>9</sup> Holyoake menjelaskan *sekularisme* sebagai suatu gagasan tentang pentingnya mendorong suatu kontruksi sosial yang terlepas dari otoritas agama tanpa menolak atau mengkritik agama.<sup>10</sup> Pada bukunya berjudul *The Prinsiples of Secularism*, Holyoake menjelaskan;

*Sekularisme adalah kajian tentang upaya mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alat-alat materi; mengukur kesejahteraan manusia dengan aturan utilitarian, serta menjadikan pelayanan terhadap orang lain sebagai tugas kehidupan. Sekularisme mengaitkan pada keberadaan sekarang dari manusia, serta pada tindakan, hal-hal yang bisa diuji melalui pengalaman dalam kehidupan – menjadikannya sebagai tujuannya pembangunan sifat dasar fisik, moral dan intelektual dari manusia menuju titik tertinggi yang dapat dibayangkan, sebagai tugas mendasar dari masyarakat; menanamkan kemampuan praktis moralitas alami yang terpisah dari ateisme, teisme atau Kekristenan; melibatkan para penganutnya dalam upaya mewujudkan peningkatan manusia melalui cara-cara material dan*

<sup>6</sup> M. Arfan Mu'ammam, *Majukab Islam dengan Menjadi Sekuler?: Kasus Turki* (Ponorogo: CIOS, Cet. 2, 2015), 46-47.

<sup>7</sup> Junaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika: Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2003), 182.

<sup>8</sup> M. Arfan Mu'ammam, *Majukab Islam dengan Menjadi Sekuler?...*, 3.

<sup>9</sup> Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim*, terj. Aan Rukmana & Albanna Choirzzad (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 172.

<sup>10</sup> Ahmad Djarmiko, *Agama dan Kajian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019), 105.

*membuat kesepakatan-kesepakatan ini sebagai landasan bagi persatuan bersama bagi semua yang ingin mengelola kehidupan dengan nalar dan memuliakannya dengan pelayanan.*<sup>11</sup>

Secara bahasa, kata *secular* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu; *saeculum* yang artinya adalah waktu dan tempat atau ruang. Arti pertama menjelaskan tentang suatu periode waktu yaitu “sekarang” atau “kini”. Sedangkan arti kedua menjelaskan tentang ruang atau tempat yang merujuk kepada “alam dunia”. Sehingga istilah *saeculum* memiliki arti “masa kini” atau “zaman kini” yang merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia (alam dunia). Kata tersebut menekankan proses kesejarahan manusia yang dapat dirujuk pada keadaan dunia pada suatu masa, waktu atau zaman kini.<sup>12</sup> Harvey Cox mengartikan *sekularisme* sebagai *liberation of man from religious and metaphysical tutelage, the turning of this attention away other world and toward this one*. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa istilah tersebut merupakan paham tentang pembebasan manusia dari otoritas agama atau segala hal lain yang dapat memalingkan manusia dari alam dunia.<sup>13</sup>

M. Arfan Mu’ammam mengartikannya sebagai paham keduniawian yang menolak nilai-nilai agama.<sup>14</sup> Senada dengan pengertian tersebut, Nurcholish Majdid mengatakan *sekularisme* sebagai “*perwujudan modern dari paham dahriyah, seperti yang tertera dalam al-Quran (Q 45: 24)... Jadi jelas, sekularisme tidak sejalan dengan agama, khususnya agama Islam*”.<sup>15</sup> Muhammad Tahir Azhary mendefinisikannya sebagai suatu paham yang berusaha untuk menghilangkan atau memisahkan agama dari segala bidang kehidupan, seperti; kenegaraan dan politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan hukum.<sup>16</sup> Definisi komperhensif tentang *sekularisme* dapat didapati dengan meninjaunya melalui tiga kaca mata, yaitu; filsafat, sosiologi dan ilmu politik. Secara filosofis, *sekularisme* dapat diartikan sebagai penolakan terhadap sesuatu yang metafisik dan transenden dan lebih memusatkan pada sesuatu yang eksistensial dan empiris. Secara sosiologis, *sekularisme* dapat diartikan sebagai proses modernisasi secara bertahap menuju pada pengurangan dominasi agama dalam segala hal. Sedangkan

<sup>11</sup> Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal...*, 174.

<sup>12</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, 30.

<sup>13</sup> M. Syukri Isma’il, *Kritik Terhadap Sekularisme: Pandangan Yusuf Qardhawi* (Ponorogo: CIOS, Cet. 2, 2015), 6.

<sup>14</sup> M. Arfan Mu’ammam, *Majukab Islam dengan Menjadi Sekuler?...*, 4.

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, ed. Budhy Munawar-Rachman (Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019), 339.

<sup>16</sup> M. Syukri Isma’il, *Kritik Terhadap Sekularisme...*, 7.

berdasarkan ilmu politik, *sekularisme* dapat diartikan sebagai sebuah paham yang memisahkan agama dan negara atau ruang privat dan ruang publik.<sup>17</sup>

*Sekularisme* berbeda dengan *sekularisasi*. S.M.N. al-Attas mengatakan dalam bukunya berjudul *Islam dan Sekularisme*, “*sekarang kita mesti memberikan perhatian kepada kenyataan bahwa mereka membezakan antara sekularisasi dan sekularisme*”. Al-Attas menjelaskan *sekularisasi* sebagai suatu proses terus menerus yang terbuka dan berkelanjutan dalam upaya mengkonstruksi nilai-nilai dan paradigma. Hal tersebut selalu diperbarui mengikuti perkembangan zaman atau evolusi sejarah. Sedangkan *sekularisme* dapat diartikan sebagai suatu agama. Hal ini karena sifatnya yang tertutup dan menyediakan suatu paradigma serta nilai mutlak yang dapat digunakan untuk menafsirkan kehidupan. Berdasarkan hal ini, *sekularisme* dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi.<sup>18</sup> Selain itu, *sekularisasi* muncul sebagai reaksi atas proses modernisasi pada masa *renaisans*. Saat itu terjadi proses alienasi nalar agama (*The Age of Religion*) oleh nalar akal (*The Age of Reason*). Sedangkan *sekularisme* adalah pemusatan pikiran pada dunia materi lebih banyak ketimbang dunia spiritual. Akibatnya, masyarakat sekuler hanya memikirkan kehidupan dunia dan benda-benda materi.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan paragraf sebelum ini, telah terlihat perbedaan antara kedua istilah tersebut. Analisa mendalam tentang perbedaan sekaligus persamaan dapat terlihat pada ungkapan S.M.N. al-Attas yang mengatakan bahwa;

*“Adapun ideology sekularisme, seperti proses sekularisasi, juga menghilangkan pesona daripada alam tabi’i dan meniadakan kesucian dan kewibawaan agama daripada politik, tetapi tidak pernah menghapus kesucian dan kemutlakan nilai-nilai karena ia membentuk sistem nilainya sendiri dengan maksud supaya dipandang sebagai mutlak dan tidak berubah. Maka sekularisme tidak seperti sekularisasi yang menisbikan semua nilai dan menghasilkan keterbukaan dan kebebasan yang perlu bagi tindakan manusia dan untuk sejarah. Atas alasan ini mereka menganggap sekularisme sebagai ancaman terhadap sekularisasi dan mendesak agar ia terus diawasi dan dikekang serta dicegah agar tidak menjadi ideologi negara”.*<sup>20</sup>

Harvey Cox dalam bukunya berjudul *The Secular City* merumuskan 3 inti dari *sekularisasi*. Rumusan tersebut antara lain; penghilangan pesona daripada alam semesta (*disenchantment of nature*); peniadaan kesucian dan kewibawaan agama daripada politik (*desacralization of politics*) dan penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai daripada kehidupan (*deconsecration of values*).<sup>21</sup> Rumusan pertama, memiliki pengertian sebagai

<sup>17</sup> Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal...*, 175.

<sup>18</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, 34.

<sup>19</sup> M. Arfan Mu’ammam, *Majukab Islam dengan Menjadi Sekuler?...*, 5.

<sup>20</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, 34.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 32.

pembebasan alam dari nilai ketuhanan seperti kepercayaan kepada animistis, dewa dan sifat magis alam. Rumusan kedua, memiliki pengertian penghapusan otoritas agama beserta perannya pada politik. Sedangkan rumusan ketiga memiliki pengertian bahwa semua nilai bersifat terbuka untuk perubahan, termasuk nilai agama.<sup>22</sup>

### ***Sekularisasi dan Sekularisme di China***

Agama asli di China adalah Taoisme yang dikenal sebagai agama pribumi. Selain itu masih terdapat agama lainnya, seperti; Budha, Islam, Katolik dan Protestan. Budha adalah agama pertama yang datang dari India pada abad pertama Masehi. Islam merupakan agama kedua yang datang pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan Katolik baru masuk sekitar abad ke-13 Masehi, walaupun mengalami keterhambatan. Penyebaran yang lebih luas, baru terjadi pada tahun 1940-an, saat para misionaris Barat masuk ke China dalam jumlah besar. Sedangkan Protestan baru masuk pada tahun 1807 yang datang dari Eropa. Menurut statistika Organisasi Orang Beragama di China tahun 2003, dikatakan bahwa pemeluk Katolik berjumlah 5 juta, pemeluk Protestan berjumlah 16 juta, pemeluk Islam berjumlah 20 juta, namun untuk pemeluk Budha dan Taoisme tidak diketahui jumlahnya.<sup>23</sup> Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa terdapat keragaman serta banyaknya jumlah pemeluk agama di China

Pada perkembangan keberagaman, pemerintah China telah membuat beberapa kebijakan tentang kebebasan beragama. Hal tersebut dapat dilihat pada konstitusi Republik Rakyat Cina tahun 2004, Pasal 36. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menganut dan bebas untuk tidak menganut kepercayaan atau agama. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan bahwa tidak ada organisasi negara atau publik maupun perseorangan yang dapat melakukan pemaksaan terkait kebebasan beragama. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi aktivitas agama selagi tidak merusak kesehatan masyarakat, mengganggu ketertiban umum dan mengintervensi sistem pendidikan.<sup>24</sup> Berdasarkan hal ini terlihat bahwa China memiliki perhatian lebih pada kebebasan beragama masyarakatnya.

Walaupun demikian, kebebasan beragama tersebut mendapat pengecualian. Pengecualian tersebut dapat dilihat pada keharusan anggota Partai Komunis China

---

<sup>22</sup> Budhy Munawwar-Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 7.

<sup>23</sup> Sang Ji, *Religiusitas Orang-Orang China*, terj. Kurnia NK (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2014), 3-4.

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Republik Rakyat Cina* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 16.

(PKC) untuk ateis. Hal tersebut telah diatur dalam konstitusi partai yang menjelaskan bahwa seorang anggota harus menjadi ateis dan menjadikannya keyakinan seumur hidup. Berbanding sebaliknya jika seorang anggota ingin memeluk suatu agama, ia harus menanggalkan status keanggotaannya. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa nilai agama tidak diperkenankan untuk masuk pada ranah politik. Selain itu terdapat pula suatu kebijakan yang menjelaskan bahwa kepercayaan suatu agama tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan administrasi, peradilan dan pendidikan yang ditangani pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga tidak berhak mencampuri urusan agama, seperti mencampuri urusan pernikahan dalam tradisi suatu agama, negara tidak berhak melarang suatu agama.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bagaimana bentuk dari *sekularisasi* di China. *Sekularisasi* ini dapat dilihat pada peniadaan kesucian dan kewibawaan agama dalam politik (*desacralization of politics*).<sup>26</sup> Nilai dan kepentingan agama dinegasikan hanya sebatas urusan pribadi dan tidak diizinkan berpartisipasi dalam urusan partai. Hal ini dapat dipahami lebih jauh jika melihatnya dari konsep *socialist legality* (hukum negara sosialis). Karakteristik dari negara ini adalah hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan sosial. Selain itu, *socialist legality* menyediakan konstitusional tentang propaganda anti agama.<sup>27</sup> Salah satunya dapat dilihat pada ungkapan Wang Zuoan, Direktur Badan Negara Urusan Keagamaan yang mengatakan, “*anggota partai seharusnya tak memiliki kepercayaan agama yang merupakan aturan bagi seluruh anggota partai*”. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anggota partai yang masih menganut suatu kepercayaan, berarti telah melecehkan nilai-nilai partai yang berdasarkan pada dialetika materialisme.<sup>28</sup>

Hal demikian, dapat juga dilihat pada kebijakan pendirian organisasi keagamaan di Cina.<sup>29</sup> Tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk memperlancar segala kebijakan yang berkaitan dengan agama. Kebijakan pendirian organisasi China menjelaskan

---

<sup>25</sup> Sang Ji, *Religiusitas Orang-Orang China...*, 36-39

<sup>26</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, 32.

<sup>27</sup> La Ode Husen, *Negera Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan: Edisi Revisi* (Makassar: CV. Social Politiv Genius (SIGn), 2009), 23.

<sup>28</sup> Kompas.com, *Anggota Partai Komunis China Dijatuhi Sanksi Jika Memeluk Agama*, diakses 9 Juni 2021, <https://internasional.kompas.com/read/2017/07/19/21332111/anggota-partai-komunis-china-dijatuhi-sanksi-jika-memeluk-agama>

<sup>29</sup> Berdasarkan kebijakan tersebut, maka berdiri tujuh organisasi agama, antara lain; Asosiasi Buddhis China, Asosiasi Tao China, Asosiasi Islam China, Komita Gerakan Patriotik Tiga Diri Gereja Protestan China, Dewan Kristen Tionghoa, Asosiasi Pratiotik Katolik China dan Lembaga Uskup Katolik China. Selain organisasi-organisasi tersebut, juga terdapat 3000-an organisasi keagamaan yang beroperasi di tingkat local.

bahwa semua organisasi harus melakukan pendaftaran demi mendapatkan legitimasi atas kegiatannya. Menurut “*Metode Penyelenggaraan Pendaftaran Keagamaan*” yang diterbitkan pada tahun 1991 oleh Biro Urusan Agama Dewan Negara, sebuah organisasi keagamaan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan jika ingin melakukan pendaftaran.<sup>30</sup> Salah satu hal yang perlu dicermati bahwa organisasi keagamaan di China adalah badan hukum independen. Sehingga pada pengelolaan pemeluknya, organisasi bertanggung jawab penuh dan bukan urusan negara.<sup>31</sup> Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa kepentingan agama tidak termasuk dalam kepentingan negara. Kepentingan tersebut yaitu pada pengelolaan organisasi yang seharusnya negara hadir berpartisipasi dalam menyerap aspirasi dan kepentingan setiap agama di China.

Berkenaan tentang pendidikan keagamaan, negara memisahkan pendidikan agama dan pendidikan nasional. Hal tersebut dapat terlihat pada program agama yang tidak pernah ada pada kurikulum umum ditingkat manapun sejak sistem pendidikan umum muncul. Walaupun demikian negara tersebut tidak melarang berdirinya sekolah-sekolah agama yang didirikan oleh organisasi-organisasi keagamaan. Hal ini dapat terlihat dengan berdirinya 60 lembaga pendidikan agama yang didirikan oleh organisasi keagamaan lokal. Namun disisi lain, pemerintah juga mendirikan lembaga pendidikan agama yang mahasiswanya diambil dari mahasiswa organisasi keagamaan di China. Namun sifatnya dari lembaga ini adalah menjadikan agama sebagai objek akademis.<sup>32</sup> Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa terjadi *sekularisasi* pada bidang pendidikan. Nilai agama dianggap tidak penting untuk dimasukkan pada kurikulum nasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan terdapat dua bentuk *sekularisasi* di China. Bentuk pertama, yaitu *desacralization of politics*<sup>33</sup> yang dapat dilihat pada kebijakan anggota PKC dan organisasi keagamaan. Pada hal ini, nilai serta peran agama telah jatuh hanya sebatas ruang privat tanpa perlu berperan aktif pada ruang publik.<sup>34</sup> Sehingga nilai politik serta kebijakannya hanya berdasarkan intepretasinya pada alam dunia saja. Hal ini sejalan dengan pemaknaan *sekularisme* sebagai paham keduniawian

---

<sup>30</sup> Persyaratan tersebut antara lain; a) melaporkan nama organisasi, alamat tetap dan penanggung jawab; b) melaporkan anggaran dasar organisasi yang bertujuan melihat relevansinya dengan hukum negara; c) melaporkan sumber pembiayaan organisasi; d) melakukan verifikasi ajaran dan hukum agama agar tidak ada yang bertentangan dengan segala kebijakan pemerintah.

<sup>31</sup> Sang Ji, *Religiusitas Orang-Orang China...*, 29-40

<sup>32</sup> *Ibid.*, 42-43.

<sup>33</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, 32.

<sup>34</sup> Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal...*, 75.



yang menolak nilai agama.<sup>35</sup> Sedangkan bentuk kedua, yaitu *deconsecration of values*<sup>36</sup> yang dapat dilihat pada kebijakan pendidikan agama. Pada hal ini, nilai agama seharusnya dapat menjadi dasar dari tujuan pendidikan untuk membentuk akhlak dan budi pekerti. Pada sisi keilmuan dan teknologi, nilai agama perlu berkontribusi sebab sifat keduanya seperti pisau yang dapat menjadi baik atau buruk tergantung penggunaannya. Agama berfungsi sebagai parameter keduanya, sebab mengajarkan nilai kebaikan dan keburukan.<sup>37</sup>

*Sekularisasi* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pada akhirnya juga menunjukkan *sekularisme* di China. Hal ini dapat dipahami dari pengadopsian ideologi *Marxisme-Leninisme* pada Revolusi China, 10 Oktober 1911 hingga saat ini.<sup>38</sup> Ideologi tersebut dijadikan sebagai dasar berpikir dan bertindak pada setiap kebijakan negaranya. Selain itu, dapat juga dipahami dari perkataan Xi Jinping (Presiden China saat ini) pada perayaan HUT Karl Marx ke 200 tahun 2018 silam. Ia mengatakan “*menorehkan Marxisme ke dalam bendera Partai Komunis China merupakan hal yang sepenuhnya tepat. Adalah sesuatu yang sama sekali benar untuk tak henti-hentinya mendorong signifikansi dan modernisasi Marxisme*”.<sup>39</sup> Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa *sekularisasi* yang terjadi di China bukan sebagai suatu proses terbuka, melainkan sebagai proses tertutup. Proses tersebut, dilakukan dengan melakukan *desacralization of politics* dan *deconsecration of values*, namun disatu sisi menjadikan ideology *Marxisme-Leninisme* sebagai suatu yang sakral.

*Sekularisasi* di China merupakan dampak dari *sekularisme* dan bukan sebaliknya. Hal ini sebab ideologi *Marxisme-Leninisme* menjelaskan tentang penegasian agama. Paham tersebut berangkat dari pemikiran Karl Marx yang menganggap agama sebagai candu masyarakat. Agama menurutnya, cenderung mendorong pada kebahagiaan khayalan yang tidak menyentuh pada penyelesaian atas masalah-masalah manusia. Sehingga Marx menyarankan untuk meninggalkan agama demi meraih kebahagiaan sejati.<sup>40</sup> Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa paham ini telah menggiring kepada

<sup>35</sup> M. Arfan Mu'ammam, *Majukab Islam dengan Menjadi Sekuler?...*, 4.

<sup>36</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, 32.

<sup>37</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 43.

<sup>38</sup> Wiriaatmadja, dkk, *Sejarah dan Peradaban China: Analisis Filosofis-historis dan sosio-antropologis* (Bandung: Humaniora, 2003), 8-12

<sup>39</sup> Kabar24. *Hut ke-200 Karl Marx; Xi Jinping Tegaskan Arti Marxisme Bagi China*, diakses 17 Juni 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180504/19/791735/hut-ke-200-karl-marx-xi-jinpingtegas-kan-arti-marxisme-bagi-china>

<sup>40</sup> Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. 2, 2012), 204.

paham *sekularisme*. Pada hal ini, *deconsecration of values* ditujukan hanya pada nilai agama namun tidak pada paham *Marxisme-Leninisme*. Paham tersebut telah sengaja dibentuk atas tujuan agar dipandang sebagai mutlak dan tidak berubah.<sup>41</sup> Penjelasan ini sesuai dengan pengertian *sekularisme* sebagai paham yang berusaha untuk mengalienasi agama dari segala bidang kehidupan.<sup>42</sup>

## Penutup

Sekularisasi yang terjadi di China terjadi dalam dua bentuk, yaitu peniadaan kesucian dan kewibawaan agama daripada politik (*desacralization of politics*) dan penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai daripada kehidupan (*deconsecration of values*). Bentuk pertama dapat dilihat pada kebijakan keanggotaan Partai Komunis China (PKC) dan organisasi keagamaan. Sedangkan bentuk yang kedua dapat dilihat pada kebijakan pendidikan agama. Selain itu, sekularisasi di China tidak berjalan sebagai proses terbuka yang mengendaki perubahan terus menerus dalam mengkonstruksi nilai. Melainkan sebagai proses tertutup yang menegaskan nilai dan peran agama dalam kehidupan, namun mengambil paham *Marxisme-Leninisme* sebagai sesuatu yang sakral. Berdasarkan hal ini, paham tersebut merupakan nilai dari sekularisme dan dasar terjadinya sekularisasi di China.

## Daftar Pustaka

- Adian Husaini, *Mengapa Barat Menjadi Sekuler-Liberal?*. Ponorogo: CIOS, Cet. 2, 2015.
- Ahmad Djarmiko, *Agama dan Kajian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019.
- Budhy Munawwar-Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj. Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. 2, 2012.
- I Made Pasek Diantha, *Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Republik Rakyat Cina*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Junaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika: Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2003.
- La Ode Husen, *Negera Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan: Edisi Revisi*. Makassar: CV. Social Politiv Genius (SIGn), 2009.
- M. Arfan Mu'ammam, *Majukah Islam dengan Menjadi Sekuler?: Kasus Turki*. Ponorogo: CIOS, Cet. 2, 2015.
- M. Syukri Isma'il, *Kritik Terhadap Sekularisme: Pandangan Yusuf Qardhawi*. Ponorogo: CIOS, Cet. 2, 2015.

---

<sup>41</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, 34.

<sup>42</sup> M. Syukri Isma'il, *Kritik Terhadap Sekularisme...*, 7.

- Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim*, terj. Aan Rukmana & Albanna Choirzzad. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Nucholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, ed. Budhy Munawar-Rachman. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019.
- Sang Ji, *Religiusitas Orang-Orang China*, terj. Kurnia NK. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2014.
- Syamsuddin Arief, *Islam dan Diabolisme Intelektual*. Jakarta Selatan: INSISTS, 2017.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme*. Kuala Lumpur: RZS-Casis, 2020.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC, 2001.
- Wiriaatmadja, dkk, *Sejarah dan Peradaban China: Analisis Filosofis-historis dan sosio-antropologis*. Bandung: Humaniora, 2003.
- Kabar24. *Hut ke-200 Karl Marx, Xi Jinping Tegaskan Arti Marxisme Bagi China*, diakses 17 Juni 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180504/19/791735/hut-ke-200-karl-marx-xi-jinpingtegas-kan-arti-marxisme-bagi-china>.
- Kompas.com, *Anggota Partai Komunis China Dijatubi Sanksi Jika Memeluk Agama*, diakses 9 Juni 2021, <https://internasional.kompas.com/read/2017/07/19/21332111/anggota-partai-komunis-china-dijatuhi-sanksi-jika-memeluk-agama>.